

KAJIAN GERAKAN PENSEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (G-PEMP) DI SUMATERA BARAT

Eni Kamal

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta.
Jln. Sumatera Ulak Karang Padang, Sumatera Barat
Email: ekamal898@yahoo.com

Diterima : 18/01/2013 Direvisi : 16/02/2013 Disetujui : 30/04/2013

ABSTRAK

Lingkup wilayah pelaksanaan kajian G – PEMP kelautan dan perikanan Sumatera Barat adalah meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang meliputi 42 kecamatan pesisir, dan 89 nagari/desa pesisir. Dari 42 kecamatan dan 89 nagari/desa tersebut ditentukan secara sengaja beberapa kecamatan dan nagari pada setiap kabupaten/kota berdasarkan kriteria yang dapat mendukung keberhasilan program G-PEMP ini. Rekomendasi dalam kebijakan pada kegiatan G-PEMP di Sumatera Barat mencakupi 4 kegiatan; Program paket perikanan tangkap, paket budidaya perairan, paket penanganan/ pengolahan hasil, dan paket pemasaran hasil perikanan.

Kata Kunci : gerakan, perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, dan pemasaran.

THE ECONOMIC WELFARE MOVEMENT STUDY OF COAST COMMUNITY (G-PEMP) IN WEST SUMATERA

ABSTRACT

The area scope of study implementation ocean and fisheries (G-PEMP) in west Sumatera. Include 7 district/city coast; Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, and the Mentawai Islands, which include 42 coastal districts and 89 coastal villages. From 42 districts and 89 villages deliberately determined several districts and villages in each district / city based on criteria that could support the success of the program G-PEMP. Policy recommendations on activities of G-PEMP in West Sumatra covered 4 activities; capture fisheries package program, aquaculture package, handling/processing product package, and marketing of fishery products package.

Keywords: movement, fisheries, aquaculture, processing, and marketing

PENDAHULUAN

Sumatera Barat mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang relatif besar, seperti; panjang garis pantai termasuk termasuk Kepulauan Mentawai 2.543,80 km, luas perairan teritorial dan ZEE 186.500 km², potensi lestari sumberdaya ikan sebesar 312.550 ton per tahun, pulau-pulau kecil 185 buah, potensi mangrove 39.832 ha, dan terumbu karang 6.974,91 ha. Jumlah nelayan pada tahun 2011 sebesar 34.584 orang, Selain potensi perikanan yang terdapat di laut, Sumatera Barat juga mempunyai potensi perairan umum yang dapat dijadikan sebagai lokasi budidaya perikanan dengan luas 53.700 ha yang terdiri dari danau, sungai, telaga, dan rawa. Pada kawasan pesisir dan lautan terkandung sumberdaya alam yang cukup besar, terutama sumberdaya kelautan dan perikanan yang perlu mendapat perhatian dari pihak terkait untuk meningkatkan pemberdayaan dalam upaya pengentasan kemiskinan di kawasan pesisir (DKP, 2011) ⁽¹⁾ dan Bappeda dan BPS (2011). ⁽²⁾

Kamal, 2006⁽³⁾ dalam dalam kajiannya menyebutkan bahwa potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang relatif besar belum banyak

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir dalam pengembangan perekonomiannya melalui pengelolaan sumberdaya alam tersebut, yang berpolakan pada kebiasaan kehidupan masyarakat pesisir yang cenderung dalam kesehariannya seperti mempunyai budaya masyarakat nelayan relatif boros, ketergantungan yang tinggi terhadap rentenier, pendidikan yang relatif rendah, masih kurangnya kepercayaan lembaga keuangan untuk memberikan modal, kurangnya dukungan lintas sektor dalam pengembangan usaha nelayan, belum adanya mekanisme yang sistematis untuk menyusun kebijakan khusus bagi masyarakat nelayan dan belum maksimalnya anggaran lintas sektor baik pusat maupun daerah untuk program-program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pengentasan kemiskinan yang pernah diadakan, khususnya di wilayah pesisir, mengalami banyak kegagalan. Faktor kegagalan tersebut adalah kurang tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan ekonomi kawasan

pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil, yang berpengaruh pada aspek pengembangan program dan keberkelanjutan serta pemasaran hasil/produk perikanan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat nelayan di daerah pesisir, kurang intensifnya pelayanan ataupun *technical assistance* yang menyebabkan terjadinya proses tumpang tindih antara program yang satu dengan program, kurang bersinambungnya suatu program suatu *need assesment* yang memadai sehingga rekomendasi ataupun program yang dilaksanakan kurang sesuai dengan minat, potensi sumberdaya manusia, ataupun sarana dan prasarana yang tersedia, lemahnya proses *transfer of technology* sehingga kurang memungkinkan terjadinya kesinambungan kegiatan masyarakat pasca program atau kegiatan, dan lemahnya sistem pendataan, sehingga seringkali program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak efektif (Sayuti, 2004)⁽⁴⁾.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan dilakukan kajian terhadap suatu program yang perpolakan gerakan pensejahteraan ekonomi masyarakat pesisir (G-PEMP), sehingga secara bertahap pengentasan

kemiskinan bagi kesejahteraan untuk pengembangan ekonomi masarakat pesisir secara menyeluruh dapat berubah ke arah yang lebih baik.

Tujuan

Tujuan kajian gerakan pensejahteraan ekonomi masyarakat pesisir (G – PEMP) kelautan dan perikanan Sumatera Barat adalah; untuk melihat basis-basis kawasan rumah tangga miskin pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat dan merekomendasikan spesifikasi paket bantuan bagi masyarakat pesisir yang masuk dalam kategori masih rumah tangga miskin.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kajian G-PEMP kelautan dan perikanan Sumatera Barat adalah bersifat prediksi dan deskriptif dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat yang merupakan penjabaran kebijakan pemerintah daerah Sumatera Barat yang berhubungan dengan G-PEMP. Kajian ini dilakukan pada Bulan Desember 2011- Februari 2012. Lokasi kajian G-PEMP ini adalah mencakupi 5 Kabupaten dan 2 Kota, yang semuanya mencakupi pada 42 Kecamatan dan 89 Nagari/Desa yang tersebar disepanjang kawasan pesisir di Sumatera Barat.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dan dengan masyarakat pesisir khususnya nelayan yang berada pada lokasi kajian, selain itu dilengkapi dengan kuisioner. Selain itu juga dilakukan wawancara langsung dengan pengambil kebijakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten/Kota. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Sedangkan data rumah tangga miskin diambil dari data Provinsi, Kabupaten/Kota yang berkerja sama dengan BPS tahun 2011, dan sampai saat penelitian ini dilakukan data RMT pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta Kabupaten /Kota masih mengacu pada data tersebut. Pada pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat, sebutan *Nagari* setingkat dengan pemerintahan desa secara nasional.

Analisis data dalam kajian G-PEMP kelautan dan perikanan Sumatera Barat dilakukan secara diskriptif, dengan aspek utama yang menjadi cakupan dalam kajian G-PEMP ini terdiri dari mata pencarian dominan masyarakat pesisir di wilayah kajian, Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi

Sumatera Barat maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota pesisir yang berhubungan dengan G-PEMP.

HASIL

G-PEMP Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat dengan panjang garis pantai 152,00 km mempunyai 7 kecamatan pesisir; Kecamatan Sungai Beremas, Koto Balingka, Sungai Aur, Sasak Ranah Pasisie, dan Kecamatan Kinali, dan 8 Nagari/Desa yang berhubungan langsung dengan laut. Jumlah nelayan 2.762 orang dan RTM sektor perikanan tangkap berjumlah 1.827 KK dengan persentase nelayan miskin mencapai 66,15% dari jumlah RTM perikanan Sumatera Barat, seperti pada Tabel 1.

Pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Pasaman Barat didapati tiga Nagari/Desa (Air Bangis, Sasak, dan Katiagan-Mandiingin) yang mempunyai persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) yang masing-masingnya 55.99%, 20,43% dan 19,59%, sedangkan 5 Nagari?Desa berkisar antara 3,62-0.05%. Nagari Air Bangis RTM cukup tertinggi di pesisir Kabupaten Pasaman Barat, pada hal potensi dan kondisi kelautan dan perikanannya cukup baik, bahkan

hampir 32,50% produksi perikanan Bangis (BPS dan DKP Kabupaten Sumatera Barat berasal dari Nagari Air Pasaman Barat)⁽⁵⁾.

Tabel 1
Komposisi Rumah Tangga Miskin Perikanan Kabupeten Pasaman Barat.

No	Kecamatan	Nagari/Desa	Jumlah RTM (KK)	Persentase (%)
1.	Sungai Beremas	Air Bangis	1.023	55,99
2.	Sungai Aur	Sungai Aur	66	3,61
3.	Talamau	Sinuruik	1	0,05
4.	Pasaman	Aua Kuning	2	0,11
	-	Aia Gadang	2	0,11
5.	Luhak Nan Duo	Kapar	2	0,11
6.	Sasak Ranah Pasisie	Sasak	373	20,43
7.	Kinali	Katiagan-Mandiingin	358	19,59
Jumlah			1.827	100

Sumber : Bappeda dan BPS Pasaman Barat, 2011.

G-PEMP Kabupaten Agam

Kabupaten Agam hanya mempunyai satu Kecamatan yang berada di kawasan pesisir, yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara dan memiliki 2 (dua) nagari/Desa; Nagari Tiku Selatan dan Nagari Tiku V Jorong. Jumlah nelayan 2.152 orang dan rumah tangga miskin sektor perikanan tangkap berjumlah 125 KK dengan persentase

nelayan miskin 5,81% dari jumlah RTM perikanan Sumatera Barat. Walaupun relatif kecil persentase nelayan miskinnya namun perlu mendapat perhatian dari pihak terkait dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakatnya terutama nelayannya. Komposisi RTM perikanan berdasarkan data sensus KK miskin di Kabupaten Agam, (BPS dan DKP Kabupaten Agam, 2011)⁽⁶⁾, seperti pada Tabel 2.

Tabel 2
Komposisi Rumah Tangga Miskin Pesisir Kabupaten Agam.

No	Kecamatan	Nagari/Desa	Jumlah RTM (KK)	Persentase (%)
1.	Tanjung Mutiara	Tiku V Jorong	41	32,80
	-	Tiku Selatan	84	67,20
Jumlah			125	100

Sumber : Bappeda dan BPS Agam, 2011.

Dari dua Nagari/Desa menunjukkan bahwa Nagari Selatan jumlah RTM lebih besar dari Tiku V Jorong, masing-masingnya sebesar 67,20% dan

32,80%. Kabupaten Agam hanya memiliki dua nagari RTM, namun kondisinya perlu sentuhan dan pemberdayaan secara bekesinam

bungan pada suatu program G-PEM. Umumnya aktivitas kegiatan nelayannya lebih didominasi oleh perikanan tangkap.

G-PEMP Kabupaten Padang Pariaman

Jumlah nelayan di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 2.152 orang dan rumah tangga miskin sektor perikanan tangkap berjumlah 338 KK atau

sebesar 7,72% dari jumlah RTM perikanan Sumatera Barat (BPS dan DKP Kabupaten Padang Pariaman)⁽⁷⁾.. Kecilnya persentase nelayan miskin pada daerah ini adalah disebabkan sudah majunya kegiatannya penangkapan, terutama dengan telah dicanangkan program motorisasi oleh pemerintah daerahnya. Jumlah RTM Kabupaten Padang Pariaman seperti tergambar pada pada Tabel 3.

Tabel 3
Komposisi Rumah Tangga Miskin Pesisir Kabupaten Padang Pariaman.

No.	Kecamatan	Nagari/Desa	Jumlah RTM (KK)	Persentase (%)
1	Batang Anai	Ketaping	18	5,33
2	Ulakan Tapakis	Ulakan	65	19,23
	-	Tapakis	4	1,18
3	Nan Sabaris	Sunur	19	5,62
4	V Koto Kamp.Dalam	Campago	17	5,03
5	Sungai Limau	Kuranji Hilir	70	20,71
	-	Pilubang	76	22,48
6	Batang Gasan	Gasan Gadang	30	8,88
	-	Malai V Suku	39	11,54
Jumlah			338	100

Sumber : Bappeda dan BPS Padang Pariaman, 2011.

Nagari/Desa Pilubang adalah mempunyai RTM terbesar 22,48% dibandingkan dengan Nagari/Desa lainnya, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir (nelayan) lebih kurang 34,23% masih belum atau tamat Sekolah Dasar, sehingga kemampuan penyerapan teknologi tergolong rendah, kemudian diikuti oleh Nagari/Desa Kuranji Hilir 20,71% dan Ulakan

sebesar 19,23%. Dari jumlah RTM perikanan Kabupaten Padang Pariaman yang paling rendah adalah Tapakis 1,18% dan kawasan ini adalah sudah berada pada kawasan perkotaan.

G-PEMP Kota Pariaman

Kota Pariaman merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman, panjang garis pantai 12,7 km

dan mempunyai 3 (tiga) Kecamatan pesisir; Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman Tengah, dan Kecamatan Pariaman Selatan, dan mempunyai 14 desa/kelurahan yang berhubungan dengan laut. Jumlah nelayan Kota Pariaman 1.177 orang dan rumah tangga miskin sektor perikanan tangkap berjumlah 129 KK dengan persentase nelayan miskin mencapai 10,96% dari jumlah RTM perikanan Sumatera Barat. Setelah pemekaran jadi Kota, kawasan

pesisir Kota Pariaman juga sebagian besar telah terjadi perubahan mata pencarian masyarakat, karena sudah menjadi kawasan perkotaan, sehingga sebagian nelayan mengalihkan mata pencariannya ke sektor lain, seperti perdagangan dan jasa. Komposisi RTM perikanan Kota Pariaman tahun 2011 setiap desa/kelurahan pesisir dapat dilihat pada (BPS dan DKP Kabupaten Kota Pariaman)⁽⁸⁾, seperti pada Tabel 4. di bawah ini.

Tabel 4.
Komposisi Rumah Tangga Miskin Pesisir Kota Pariaman.

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah RTM (KK)	Persentase (%)
1.	Pariaman Selatan	Sunua	6	0,65
	-	Taluak	22	17,05
	-	Marunggi	10	7,75
2.	Pariaman Tengah	Kelurahan Pasir	2	1,55
	-	Kelurahan Lohong	4	3,10
	-	Kelurahan Karan Aur	7	5,43
	-	Pauh Barat	10	7,75
3.	Pariaman Utara	Nareh	27	20,93
	-	Padang Birik-Birik	1	0,78
	-	Ampalu	19	14,73
	-	Balai Nareh	4	3,10
	-	Manggung	4	3,10
	-	Apar	3	2,33
	-	Nareh Hilia	10	7,75
Jumlah			129	100

Sumber : Bappeda dan BPS Kota Pariaman, 2011.

Kelurahan Nareh RTM (20,93%) adalah yang tertinggi berbanding dengan kawasan pesisir lainnya, karena pada kawasan pesisirnya sudah sedikit jauh dari perkotaan dan begitu juga pada Taluk (17,05%) dan Ampalu

(14,73%). Selain dari sedikit jauh dari perkotaan, tingkat pendidikan dan akses transportasi juga menyebabkan besarnya RTM pada ke tiga kawasan tersebut. Walaupun sudah masuk pada

administrasi pemerintah Kota Pariaman.

G-PEMP Kota Padang

Kota Padang adalah ibu kota provinsi Sumatera Barat ,mempunyai garis pantai 68,13 memiliki 6 (enam) kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan KotoTengah, Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, Lubuk Begalung, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, serta mempunyai 22 kelurahan yang berhubungan langsung dengan laut. Jumlah nelayan 6.898

orang dan rumah tangga miskin sektor perikanan tangkap berjumlah 1.190 KK dengan persentase nelayan miskin mencapai 17,25% dari jumlah RTM perikanan Sumatera Barat. Kota Padang sebagai ibu kota propinsi yang merupakan barometer perkembangan pembangunan di segala sektor termasuk perikanan bagi daerah lainnya, Komposisi RTM perikanan Kota Padang tahun 2008 setiap kelurahan pesisir dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Komposisi Rumah Tangga Miskin Pesisir Kota Padang.

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah RTM (KK)	Pesentase (%)
1.	Bungus Tl. Kabung	Bungus Barat	40	3,65
	-	Bungus Selatan	80	6,71
	-	Teluk Kabung Selatan	3	0,25
	-	Teluk Kabung Utara	106	8,70
	-	Teluk Kabung Tengah	49	4,12
2.	Lubuk Begalung	Gates Nan XX	287	24,10
3.	Padang Selatan	Teluk Bayur	6	0,50
	-	Air Manis	26	2,18
	-	Batang Arau	72	6,04
	-	Bukit Gado-Gado	1	0,08
4.	Padang Barat	Berok Nipah	38	3,19
	-	Purus	61	5,13
	-	Olo	6	0,50
	-	Rimbo Kaluang	33	2,77
5.	Padang Utara	Lolong Belanti	14	1,18
	-	Ulak Karang Selatan	53	4,44
	-	Air Tawar Barat	48	4,03
6.	Koto Tengah	Parupuak Tabing	54	4,53
	-	Padang Sarai	5	0,42
	-	Pasia Nan Tigo	180	15,13
	-	Bungo Pasang	11	0,92
	-	Lubuk Buayo	17	1,43
Jumlah			1.190	100

Sumber : Bappeda dan BPS Kota Padang, 2011.

Tabel 5 memperlihatkan beberapa kelurahan mempunyai nilai RTM yang relatif tinggi dibandingkan dengan nilai RTM kelurahan lainnya yang ada di pesisir maupun di pedalaman Kota Padang, hal ini kemungkinan disebabkan karena masih kurangnya sarana dan prasarana kegiatan perikanan yang dimiliki masyarakat atau faktor lainnya. Kelurahan-kelurahan tersebut meliputi Kelurahan Bungus Selatan, Teluk Kabung Utara, Gates Nan XX, Batang Arau, Purus, dan Pasia Nan Tigo dengan nilai RTM masing-masing 6,71%, 8,70%, 24,10%, 6,04%, 5,13%, dan 15,13% dari RTM perikanan Kota Padang (BPS dan DKP Kota Padang)⁽⁹⁾.

Khusus Kelurahan Teluk Kabung Selatan nilai RTM adalah paling kecil 0,25% hal ini juga tidak banyaknya nelayan yang konsentrasi mata pencariannya untuk menangkap ikan atau pengolahan hasil laut, namun tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kecilnya nelayan disebabkan oleh faktor gempa yang masih membawa trauma pada nelayannya sehingga sejak terjadinya gempa 2004 dan 2009 sebagian besar mengalihkan pada sektor perdagangan dan jasa (Ojek) Sehingga kelurahan ini dan kelurahan

lainnya yang dengan nilai RTM relatif tinggi perlu ada pertimbangan khusus dalam pengambilan kebijakan dari pihak terkait khususnya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di daerah tersebut melalui pengembangan kegiatan program perikanan.

G-PEMP Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah yang secara topografi merupakan kawasan yang mempunyai panjang garis pantai 234,20 km, mempunyai 10 kecamatan pesisir, Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, dan Kecamatan Lunang Silaut, serta mempunyai 17 nagari yang berhubungan langsung dengan laut. Jumlah nelayan Kabupaten Pesisir Selatan 13.998 orang yang merupakan jumlah nelayan terbanyak di Sumatera Barat, dan rumah tangga miskin sektor perikanan tangkap berjumlah 1.861 KK dengan persentase nelayan miskin mencapai 13,29% dari jumlah RTM Sumatera Barat. Untuk mengurangi persentase nelayan miskin di daerah ini diperlukan suatu usaha dari pihak

terkait dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat nelayan tersebut melalui pengembangan kegiatan program perikanan (BPS dan DKP Kabupaten Pesisir Selatan) ⁽¹⁰⁾.

Gambaran RTM perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 setiap nagari pesisir dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Komposisi Rumah Tangga Miskin Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. `

No	Kecamatan	Nagari/Desa	Jumlah RTM (KK)	Persentase (%)
1.	Lunang Silaut	Silaut	7	0,38
2.	Pancung Soal	Inderapura	34	1,83
3.	Linggo Sari Baganti	Punggasan	185	9,94
	-	Air Haji	104	5,59
4.	Ranah Pesisir	Sungai Tunu	17	0,91
	-	Palangai	22	1,18
5.	Lengayang	Kambang	105	5,64
	-	Lakitan	192	10,32
6.	Sutera	Taratak	89	4,78
	-	Surantih	152	8,17
7.	Batang Kapas	IV Koto Hilir	255	13,69
	-	Taluak	21	1,13
8.	IV Jurai	Painan	109	5,86
	-	Salido	157	8,44
9.	Bayang	Pasar Baru	123	6,61
10.	Koto XI Tarusan	Nanggalo	75	4,03
	-	Ampang Pula	214	11,50
Jumlah			1.861	100

Sumber : Bappeda dan BPS Pesisir Selatan, 2011.

Tabel 6 dan hasil analisis memperlihatkan beberapa beberapa nagari mempunyai nilai RTM yang relatif tinggi dibandingkan dengan nilai RTM nagari lainnya yang ada di pesisir maupun di pedalaman Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini kemungkinan disebabkan karena masih kurangnya sarana dan prasarana kegiatan perikanan yang dimiliki masyarakat atau faktor lainnya di daerah tersebut.

Nagari-nagari tersebut meliputi Nagari Punggasan, Lakitan, IV Koto Hilir, dan Nagari Ampang Pulai dengan nilai RTM masing-masing 9,94%, 10,32%, 13,69%, dan 11,50%, dari jumlah RTM Kabupaten Pesisir Selatan.

G-PEMP Kepulauan Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai panjang garis pantai 1.402,70 km memiliki 9 (sembilan) kecamatan pesisir,yaitu Kecamatan

Siberut Barat, Siberut Utara, Siberut Tengah, Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, Sipora Utara, Sipora Selatan, Sikakap, dan Kecamatan Pagai Selatan dan mempunyai 17 desa yang berhubungan langsung dengan laut.

Jumlah nelayan 3.216 orang dan rumah tangga miskin sektor perikanan tangkap berjumlah 210 KK dengan persentase nelayan miskin mencapai 6,53% dari jumlah RTM Sumatera

Barat. Untuk mengurangi persentase nelayan miskin di daerah ini diperlukan suatu usaha dari pihak terkait dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat nelayan tersebut melalui suatu usaha pengembangan kegiatan program perikanan (BPS dan DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai)⁽¹¹⁾. Gambaran RTM perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2008 setiap desa pesisir dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Komposisi Rumah Tangga Miskin Pesisir Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Kecamatan	Desa	Jumlah RTM (KK)	Persentase (%)
1.	Pagai Selatan	Sinaka	13	6,19
2.	Sikakap	Taikako	4	1,90
	-	Sikakap	33	15,71
3.	Sipora Selatan	Bosua	1	0,48
	-	Beriolou	1	0,48
	-	Mara	2	0,95
	-	Sioban	9	4,29
	-	Matobe	1	0,48
4.	Siberut Utara	Goissoinan	59	28,10
5.	Siberut Selatan	Muara Siberut	54	25,71
	-	Maileppet	21	10,00
	-	Muntei	2	0,95
6.	Siberut Barat Daya	Pasakiat Teleleu	1	0,48
	-	Katurai	2	0,95
7.	Siberut Tengah	Saibi Samukop	2	0,95
8.	Siberut Utara	Malancan	4	1,90
9.	Siberut Barat	Sigapokna	1	0,48
Jumlah			210	100

Sumber : Bappeda dan BPS Kepulauan Mentawai, 2011.

Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Selatan memiliki RTM tertinggi berbanding Kecamatan lainnya di Kepulauan Mentawai, yaitu masing-

masingnya 28,10% dan 25,71%. Tabel 7 memperlihatkan beberapa desa mempunyai nilai RTM yang relatif tinggi dibandingkan dengan nilai RTM desa

lainnya yang ada di pesisir maupun di pedalaman Kabupaten Kepulauan Mentawai, hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana dan prasarana kegiatan perikanan yang dimiliki masyarakat, wilayah yang merupakan kepulauan, sarana dan prasarana jalan yang masih terbatas atau disebabkan faktor pembatas lainnya di daerah tersebut. Desa-desa tersebut meliputi Desa Sikakap, Goissoinan, dan Muara Siberut, dengan nilai RTM masing-masing 15,71%, 28,10%, dan 25,71% dari jumlah RTM Kabupaten Kepulauan Mentawai.

PEMBAHASAN

Analisis kebutuhan program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (G – PEMP) Sumatera Barat yang dilaksanakan tahun 2012 di Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada hasil analisis lokasi penetapan G – PEMP, potensi dan kondisi perikanan yang ada, kegiatan perikanan yang telah dilaksanakan masyarakat pesisir tersebut, kemampuan dan kemauan masyarakat pesisir setempat, dan pertimbangan lainnya dari hasil diskusi dan informasi dari berbagai terkait dengan program ini. Umumnya kegiatan penangkapan

ikan di laut, pengolahan dan pemasaran ikan sangat dipengaruhi oleh musim. Sehingga pada saat-saat tertentu penangkapan ikan tidak dilakukan, karena selain pengaruh cuaca juga adanya kebiasaan nelayan tidak melakukan penangkapan ikan pada kondisi bulan qomariah penuh. Keadaan ini mengakibatkan kegiatan pengolahan dan pemasaran ikan tidak berlangsung, selain itu akan mengakibatkan kegiatan perekonomian lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan perikanan tidak berjalan dengan baik (Kamal, 2011)⁽¹⁾..

Salah satu cara mengatasi permasalahan di atas diperlukan suatu program atau usaha yang bertujuan memperkuat teknologi yang telah dimiliki masyarakat, penciptaan adanya mata pencaharian alternatif, dan mendorong adanya diversifikasi olahan hasil perikanan (Widjayanti, 2011)⁽¹³⁾., sehingga pengembangan ekonomi masyarakat pesisir Sumatera Barat secara bertahap dan berkesinambungan.

Program kebutuhan pengembangan kelautan dan perikanan melalui G – PEMP kelautan dan perikanan di Sumatera Barat mempunyai empat program paket yang meliputi seperti Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8
Program dan Kegiatan pada G-PEMP Provinsi Sumatera Barat

No.	Program Paket	Kegiatan	Ket.
1.	<i>Program paket perikanan tangkap</i>	Pengadaan mesin long tail sebagai tenaga gerak perahu, Pengadaan alat tangkap trammel net, Pengadaan alat tangkap bubu kepiting bakau, Pengadaan mesin tempel sebagai tenaga penggerak perahu, Pengadaan alat tangkap gill net monofilament, dan Pengadaan rumpon sebagai alat pengumpul ikan untuk alat tangkap payang.	
2.	<i>Program paket penanganan/pengolahan hasil perikanan:</i>	Pengadaan <i>fish box</i> . untuk menyimpan ikan agar kesegarannya terjaga, Pengadaan alat pengolah ikan, untuk meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi olahan, Pengadaan lemari asap, untuk meningkatkan nilai tambah produk, Pengadaan para-para, meningkatkan kualitas hasil olahan, Pengadaan para-para, meningkatkan kualitas hasil olahan, Pengadaan sepeda motor gandeng, sebagai sarana transportasi hasil perikanan, Pengadaan <i>show case</i> . wadah pameran dan penjualan hasil olahan ikan, Pengadaan lemari asap, untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan, dan paking hasil olahan.	
3.	<i>Program paket pemasaran hasil perikanan :</i>	Pembentukan wadah pemasaran dalam bentuk Koperasi, Bank Perkreditan (BPR) pesisir, jaringan pemasaran antar Kabupaten, Provinsi, dan promosi produk.	
4.	<i>Program paket perikanan budidaya</i>	Pengadaan lele terpal, pemanfaatan lahan kosong dan pemanfaatan limbah ikan sebagai bahan pakan tambahan, Pengadaan budidaya ikan nila, dan peningkatan diversifikasi budidaya perikanan.	

Rekomendasi dan Spesifikasi Paket G-PEMP

Masyarakat Pesisir (G-PEMP) sektor kelautan dan perikanan Sumatera Barat

Rekomendasi dan spesifikasi paket Gerakan Pensejahteraan Ekonomi

tahun 2012-2013 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.
Spesifikasi Paket G – PEMP Sumatera Barat Tahun 2012.

No	Jenis Paket	Spesifikasi	Keterangan
	Perikanan Tangkap	-	-
1.	Mesin Long Tail	Tenaga 18-30 KW,	-
2.	Mesin Tempel	Tenaga 5 PK dan 15 PK	-
3.	Tramel net	15 pieces per paket.	Dirakit sendiri oleh Nelayan
4.	Gill net Monofilament	Mesh size 1,5", No benang 20,2, 20 piece per paket.	Dirakit sendiri oleh nelayan
5.	Bubu Kepiting	Bentuk Bulat, Ø rangka 0,4 meter, Bahan rangka besi beton 6 mm, Bahan Jaring PE,Dapat terlipat.	-
6.	Rumpon	Bahan:Ban mobil bekas, Penberat:Beton/Pasir, Bahan pengumpul ikan daun palm,batang kayu jawa-jawa.Bahan lain tali PE.	Dirakit dan dipasang sendiri oleh nelayan.
	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan	-	-
7.	Fish Box	Bahan Fibreglass, isi kotor 1 M ³ ,ukuran luar 1,00 x 0,60 x 0,55 meter.	-
8.	Freezer	Kapasitas 0,5 ton.	-
9.	Alat Pengolah Kerupuk	Blender,Pemotong, Pengepres, Penghancur Daging, Alat Masak	-
10.	Alat Pengolah Ikan	-	-
11.	Lemari Asap	Bahan rangka besi "L", Bahan dinding besi	-
12.	Para-para	Bahan rangka kayu 3 x4 cm, Bahan alas waring, ukuran para-para 2,50 x 1,20 meter.	-
	Pemasaran Hasil Perikanan	-	-
13.	Sepeda Motor Becak	Merek "Viar", roda tiga.	-
14.	Sepeda Motor Gandeng	Mempunyai gandengan box dari fibreglass	-
15.	Show case	Rangka Aluminium, Dinding bawah Aluminium, Dinding atas kaca.	-
	Perikanan Budidaya	-	-
16.	Pemeliharaan ikan Nila	Benih ikan Nila ukuran 3-5	-
17.	Pemeliharaan ikan Gurami	Benih ikan Guremi ukuran 5-8.	-
18.	Lele Terpal	Bahan utama kolam dari terpal tenda anti bocor.	-

Dari program yang direkomendasikan diatas haruslah dapat dievaluasi setiap tahunnya, karena akan menjadi kajian program tahun berikutnya dan ini akan berkaitan dengan RPJMD dan Renstra masing-masing kabupaten dan kota dengan leading sektornya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam aksi kegiatan yang bersinergi dan berkesinambung. Sebagai contoh adalah dalam pemberian paket-paket bantuan yang berdasarkan pada kebutuhan dari masyarakat pesisir atau nelayan dan sekaligus dengan melakukan pembinaan, terutama pada alih teknologi tepat guna.

KESIMPULAN

Dari hasil kajian Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (G – PEMP) Sumatera Barat yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, Rumah Tangga Miskin masing-masingnya adalah di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 1.861 RTM, Kabupaten Pasaman Barat 1.827 RTM, Kota Padang 1.190 RTM, Kabupaten Padang Pariaman 338 RTM, Kepulauan Mentawai 210 RTM, Kota

Pariaman 129 RTM dan Agam sebesar 125 RTM.

Program G–PEMP Sumatera Barat tahun 2012 - 2013 terdiri dari 4 (empat) paket utama, yaitu paket perikanan tangkap, paket penanganan dan pengolahan hasil perikanan, paket pemasaran hasil perikanan, dan paket perikanan budidaya. Untuk G–PEMP Tahun Anggaran 2012-2013 yang meliputi 7 Kabupaten/Kota. Untuk kedua tahun tersebut direkomendasikan untuk diprioritaskan untuk 18 Kecamatan, dan 22 nagari/desa /kelurahan, sedangkan jumlah paket secara keseluruhan berjumlah 1.600 paket yang terdiri dari 18 jenis paket dengan rincian untuk paket perikanan tangkap 701 paket, penanganan dan pengolahan hasil perikanan 492 paket, pemasaran hasil perikanan 67 paket, dan budidaya perikanan 340 paket.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). *Profil Perikanan Tangkap Provinsi Sumatera Barat*. Padang; 2011.
2. Bappeda dan BPS Provinsi Sumatera Barat. *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2011*. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Padang; 2011.

3. Kamal, E. Manajemen Evaluasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal mangrove dan Pesisir Vol. VI(3) 2006*. PKMKP, Universitas Bung Hatta Padang; Padang 2006.
4. Sayuti, R. Developing Sustainable Microfinance Institution Involving Stakeholders: *One Gate Model A Learning Outcome From ACIAR Project in Lombok Indonesia*, The 2nd Arsa International Conference Proceeding, Mataram, March 26-29, 2004. Lombok; 2004.
5. Bappeda dan BPS Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2011. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. Simpang Empat; 2011.
6. Bappeda dan BPS Kabupaten Agam. Agam Dalam Angka Tahun 2011. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. Lubuk Basung; 2011.
7. Bappeda dan BPS Kabupaten Padang Pariaman. Padang Pariaman Dalam Angka Tahun 2011. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman. Pariaman; 2011.
8. Bappeda dan BPS Kota Pariaman. Pariaman Dalam Angka Tahun 2011. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman dan Badan Pusat Statistik Kota Pariaman. Pariaman; 2011.
9. Bappeda dan BPS Kota Padang. Padang Dalam Angka Tahun 2011. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang dan Badan Pusat Statistik Kota Padang. Padang; 2011.
10. Bappeda dan BPS Kabupaten Pesisir Selatan. Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2011. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. Painan; 2011.
11. Bappeda dan BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai Dalam Angka Tahun 2011. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tua Pejat; 2011.
12. Kamal, E.. Kondisi Usaha Perikanan Tangkap Pasca Panen di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 12 (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Padang; 2011.
13. Widjayanti, K. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 12 (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta; 2011.

Eni Kamal :
Kajian Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (G-PEMP) di Sumatera Barat